

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN IKLIM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ANTAR GENERASI

DEFRIO NANDI WARDHANA, NOVITA INDRI PRATIWI, DAN SYAHARANI

EXECUTIVE SUMMARY

Ringkasan Utama

- Sebagai negara kepulauan dengan dataran rendah yang luas dan pulau-pulau yang kecil, Indonesia sangat rentan terhadap dampak buruk dari perubahan iklim. Indonesia sudah mengalami kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan. Musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan ribuan hektar sawah gagal panen pada tahun 2019 dan juga kebakaran hutan yang semakin sulit untuk dipadamkan serta dampak-dampak akibat perubahan iklim lain yang juga terjadi di beberapa kota di Indonesia
- Pada akhir tahun 2018, *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*— sebuah panel yang terdiri dari berbagai ilmuwan yang membahas mengenai perkembangan sains terkait perubahan iklim—kembali mengeluarkan laporan penilaian yang merangkum temuan para ilmuwan dari seluruh dunia. Hasil dari laporan tersebut menunjukkan bahwa masih memungkinkan untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 1.5 derajat celsius dibandingkan masa pra industri tetapi hanya apabila melalui "transisi cepat dan luas dalam energi, daratan, perkotaan dan infrastruktur, dan juga sistem industri".
- Laporan tersebut juga memberikan estimasi anggaran karbon global yang tersisa (*remaining carbon budget*) dari awal tahun 2018 untuk masih bisa menjaga pemanasan suhu bumi di bawah target 1.5 derajat celsius (dibandingkan masa pra industri) yaitu **420 GtCO₂** untuk mempunyai 66% peluang, atau **580 GtCO₂** untuk mempunyai 50% peluang.
- Semenjak laporan IPCC tahun 2018 tersebut, mulai banyak bermunculan gerakan dan organisasi yang dipimpin oleh anak-anak muda seperti Greta Thunberg dan *Fridays for Future* di Eropa, Varshini Prakash dan Gerakan *Sunrise Movement* di Amerika Serikat yang berupaya untuk meningkatkan tekanan publik terhadap pemerintah dunia agar meningkatkan lagi ambisi mereka dalam menghadapi isu krisis iklim. Ini menunjukkan sebuah momentum baru di mana anak-anak muda yang merupakan representasi dari generasi yang akan datang di seluruh dunia mulai menuntut agar hak mereka untuk tinggal di planet yang layak huni di masa depan masih tetap terjaga.
- Prinsip keadilan antar generasi perlu diimplementasikan dalam kebijakan iklim Indonesia guna menjamin pemenuhan hak hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dimiliki generasi yang akan datang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta

menjamin pemenuhan tanggung jawab oleh generasi saat ini berupa perlindungan opsi, akses dan kualitas sumber daya lingkungan bagi generasi yang akan datang.

- Komitmen target penurunan emisi Indonesia, yang ditunjukkan dalam *Nationally Determined Contribution (NDC)* Indonesia saat ini tidak cukup ambisius dan tidak mencerminkan situasi sains terkini. Target penurunan emisi Indonesia tidak mencerminkan pertimbangan sisa anggaran karbon yang tersisa seperti yang dianjurkan dalam Laporan Khusus IPCC pada tahun 2018. Komitmen ini juga tidak mencerminkan adanya keadilan antar generasi karena komitmen iklim Indonesia saat ini tidak sejalan dengan komitmen iklim global untuk menjaga kenaikan suhu bumi target 1.5 derajat celsius (dibandingkan masa pra industri) yang mana akan mengancam keberlangsungan hidup generasi yang akan datang akibat dampak buruk dari perubahan iklim.
- Mengetahui dampak yang akan terjadi dari pemanasan suhu bumi, apabila Indonesia terus menunda melakukan upaya yang lebih ambisius untuk menanggulangi perubahan iklim dengan alasan apapun, ini berarti Pemerintah Indonesia akan **secara sadar melakukan pembunuhan massal terhadap generasi yang akan datang**. Dengan berdiam diri dan menghiraukan sains bahwa saat ini dunia berjalan menuju kenaikan suhu melampaui 1.5 derajat celsius dan penurunan emisi Indonesia tidak berkontribusi pada penurunan emisi global, Pemerintah Indonesia membiarkan generasi yang akan datang hidup di dunia yang tidak layak huni dengan kehancuran ekologis dan konflik sosial berkepanjangan, di mana mereka tidak memiliki opsi, akses dan kualitas atas sumber daya lingkungannya, alih-alih mampu bertahan hidup.

Komitmen Indonesia untuk Aksi Iklim

Guna mencapai target iklim global yang disepakati dalam *Paris Agreement*, yaitu menjaga kenaikan suhu bumi agar tidak melebihi 1.5 derajat celsius (dibandingkan masa pra industri), negara-negara pihak diwajibkan untuk menyerahkan rencana penurunan emisi. Rencana iklim ini tertuang dalam suatu dokumen yang disebut sebagai *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam *Paris Agreement* juga menyerahkan komitmen iklimnya.

Dalam NDC Indonesia, Indonesia berkomitmen untuk:

- Target pengurangan emisi sebesar 29% (*unconditional*) dengan upaya sendiri dan menjadi 41% (*conditional*) dengan kerjasama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*Business as Usual*) di tahun 2030
- Akan dicapai melalui penurunan dari sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian.

Temuan Kunci

- Komitmen Iklim Indonesia pada tahun 2030 tidak konsisten dalam menahan laju pemanasan global hingga di bawah 2 derajat celsius apalagi hingga 1,5 derajat celsius seperti yang disyaratkan dalam *Paris Agreement*.
- Kajian dari *Climate Action Tracker* menyimpulkan bahwa jika semua negara di dunia mengikuti pendekatan yang sama dengan komitmen yang Indonesia lakukan dalam NDC-nya maka planet ini akan berada pada trayektori peningkatan suhu sampai dengan 3-4 derajat celsius dibandingkan masa pra industri.
- Melalui estimasi kami, dengan menggunakan pendekatan konsep keadilan iklim, dimana negara-negara non-Annex, termasuk Indonesia, mempunyai jatah lebih dibandingkan negara-negara maju (Annex I), anggaran karbon tersisa yang adil yang dapat dikeluarkan Indonesia sampai dengan akhir abad ini adalah **14,8 GtCO₂** untuk mempunyai 66% peluang, atau **20,5 GtCO₂** untuk mempunyai 50% peluang, atau sekitar 3,5% dari sisa anggaran karbon dunia.
- Melihat skenario trayektori emisi rencana pembangunan Indonesia yang direfleksikan dalam rencana pembangunan rendah karbon Indonesia, **Indonesia akan menghabiskan sisa anggaran karbonnya pada tahun 2027.**
- Proyeksi pembangunan rendah karbon Indonesia juga mencerminkan bahwa Indonesia belum memiliki target puncak emisi. Emisi Indonesia hanya akan turun hingga tahun 2030 dan akan terus meningkat secara signifikan bahkan hingga tahun 2045.
- Kebijakan iklim yang saat ini dimiliki Indonesia belum memasukan unsur keadilan antar generasi sebagai faktor utama dalam penyusunan kebijakan iklim karena langkah penurunan emisi yang dilakukan oleh Indonesia masih jauh dari trayektori penurunan emisi global untuk mencapai target pembatasan kenaikan suhu global diatas 1,5 derajat celsius.

Rekomendasi

Indonesia harus segera meningkatkan dan menyampaikan target NDC baru yang jauh lebih ambisius, yang merefleksikan situasi sains terkini serta mencerminkan adanya keadilan antar generasi, dengan menentukan:

- Puncak emisi Indonesia paling lambat pada tahun 2020, tidak boleh melewati itu.
- Menentukan target nol emisi secepatnya, dan harus terikat secara hukum.
- Menentukan proyeksi emisi pasca tahun 2030 yang terus menunjukkan komitmen penurunan jumlah emisi sampai akhirnya mencapai nol.

Sangat penting bagi Indonesia dan negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan dekarbonisasi secepatnya. Jika mengikuti estimasi anggaran karbon tersisa secara adil yang dapat dikeluarkan Indonesia, target pengurangan emisi Indonesia pada tahun 2030 seharusnya berada ada di sebesar 88% (untuk mempunyai 66% peluang di bawah 1,5 derajat celcius) atau 73% (untuk mempunyai 50% peluang di bawah 1,5 derajat celcius) dibawah proyeksi emisi tanpa ada aksi (*Business as Usual*) atau sama dengan penurunan sebesar 8% -15% setiap tahunnya sampai dengan akhir dekade ini (2030).

Namun, juga perlu diperhatikan agar Indonesia tidak hanya melihat ini hanya sebagai masalah gas, di mana hanya narasi karbon yang dikedepankan tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan dan hak kelompok-kelompok rentan.

Indonesia perlu memenuhi kewajiban generasi saat ini terhadap generasi yang akan datang dengan melakukan upaya terbaik guna memastikan bahwa generasi di masa depan dapat hidup secara layak dengan opsi, kualitas dan akses terhadap sumber daya lingkungan yang mendukung kehidupan mereka, termasuk jaminan atas pemenuhan hak hidupnya.